

Judul : Penyertaan Modal Negara Berpotensi Bebani APBN 2022
Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

KINERJA BUMN

Penyertaan Modal Negara Berpotensi Bebani APBN 2022

JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal negara atau PMN bagi 12 badan usaha milik negara sebesar Rp 72,449 triliun dinilai akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Kementerian BUMN diharapkan memiliki kepekaan terhadap krisis akibat pandemi Covid-19 dengan mengurangi atau menunda PMN tersebut.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra PG Talatov, mengatakan, dari sisi penerimaan, terutama pajak, APBN 2022 diperkirakan masih belum pulih. Adapun dari sisi belanja, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di sektor-sektor prioritas masih membutuhkan dana besar.

Hal itu bisa berimbas pada naiknya defisit APBN tahun de-

pan. APBN 2021 diperkirakan defisit 5,3-5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Apalagi, dengan PMN 2022 yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari PMN 2021 dan ditambah dengan pengeluaran lain non-BUMN, defisit APBN tahun depan bisa tembus 6 persen. Padahal, Kementerian Keuangan menargetkan defisit anggaran bisa ditekan menjadi 4,51-4,85 persen di 2022," paparnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7), Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp 72,449 triliun bagi 12 perusahaan pelat merah. PMN tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan sejumlah perusahaan dan dalam rangka

menjalankan penugasan negara.

Menurut Abra, di tengah kondisi krisis akibat pandemi ini, Kementerian BUMN diharapkan memiliki *sense of urgency*. Masyarakat dan perusahaan swasta selama ini lebih banyak berjuang sendiri mempertahankan hidup dan usahanya, tetapi BUMN justru bergantung pada pemerintah.

Seharusnya, Kementerian BUMN memaksimalkan solusi-solusi alternatif selain PMN agar tidak membebani APBN. Misalnya, imbuh Abra, memastikan berbagai langkah efisiensi dan restrukturisasi utang terhadap BUMN-BUMN yang mengalami masalah keuangan. Selain itu, jangan sampai PMN tersebut digunakan untuk melunasi utang perseroan.

Skala prioritas

Abra berharap agar APBN 2022 tetap diprioritaskan untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan ekonomi ini tetap harus mengarah pada sektor-sektor prioritas, seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, farmasi, dan UMKM yang menjadi benteng ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, menuturkan, pemberian PMN bagi bank (PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara), baik untuk peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) maupun pengembangan bisnis, tidak tepat. Selama ini, perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan berdaya tahan tinggi di tengah

krisis akibat pandemi.

"Selama ini, BUMN yang tidak pernah ada subsidi dan proteksi adalah BUMN perbankan. Sebaiknya, BNI dan BTN menahan dividen yang disetorkan kepada pemegang saham untuk dijadikan rekapitalisasi tambahan CAR," tuturnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, prioritas PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menjalankan penugasan pemerintah. Suntikan PMN dan dividen pada 2020-2024 justru relatif seimbang.

"Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN. Hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan sebesar 6,9 persen untuk restrukturisasi," ujarnya. (HBN)